

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi perangkat daerah Kota Malang mengalami perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 mengalami perubahan sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
bahwa menyikapi perubahan sebagaimana dimaksud
 - c. pada huruf a dan huruf b, perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1050 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal

WALIKOTA MALANG,

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MALANG NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG

VISI	:	Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota bermartabat
MISI I	:	Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-12 th x 100% Penjelasan : Siswa SD/MI yang dimaksud adalah seluruh siswa SD/MI tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)	- Dinas Pendidikan	- Data Individu Sekolah, Dapodik. - Data penduduk usia 7-12 th.

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Jumlah penduduk usia antara 7-12 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 th. Penjelasan : Penduduk Kota Malang yang berusia 7-12 th yang sekolah di SD/MI	- Dinas Pendidikan	- Data Individu Sekolah, Dapodik - Data Penduduk usia 7-12 th
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13-15 th x 100% Penjelasan : Siswa SMP/MTs yang dimaksud adalah seluruh siswa SMP/MTs tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)	- Dinas Pendidikan	- Data Individu Sekolah, Dapodik - Data Penduduk usia 13-15 th
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Jumlah penduduk usia antara 13-15 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 th Penjelasan : Penduduk Kota Malang yang berusia 13-15 tahun yang sekolah di SMP/MTs	- Dinas Pendidikan	- Data Individu Sekolah, Dapodik - Data Penduduk usia 13-15 th
	5. Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas dikali 100%	- Dinas Pendidikan	- Data penduduk usia 15 th ke atas dapat dibaca tulis - Data Badan Pusat Statistik - Data Kependudukan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	6. Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan dikali 100%	- Dinas Pendidikan	- Data kelulusan setiap jenjang pendidikan - Data siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan
	7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs	Jumlah anak usia 7-15 tahun dari keluarga pra sejahtera Kota Malang yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia 7-15 tahun dari keluarga pra sejahtera Kota Malang dikali 100%	- Dinas Pendidikan	- Data jumlah siswa SD/MI sampai dengan SMP/MTs yang berasal dari keluarga prasejahtera
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali 1.000	- Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang - Hasil monev pelayanan kesehatan
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Banyaknya kematian ibu saat hamil, melahirkan, dan nifas dibagi jumlah ibu saat hamil, melahirkan dan nifas dikali 100.000	- Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang Hasil monev pelayanan kesehatan
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga medis dibagi jumlah penduduk dikali 1.000	- Dinas Kesehatan - DP3AP2KB	- Profil Kesehatan Kota Malang - Data kependudukan
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Jumlah Posyandu dibagi Jumlah Balita dikali 1.000	Dinas Kesehatan	- Hasil monev kegiatan Posyandu
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibagi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dikali 1.000	- Dinas Kesehatan - DP3AP2KB	- Data Badan Pusat Statistik - Profil Kesehatan Kota Malang - Hasil monev Pelayanan kesehatan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	- Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang

MISI 2	:	Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
--------	---	--

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah Koperasi yang ada dikali 100%	- Dinas Koperasi & UM	- Hasil kegiatan monev dan pembinaan Koperasi
	2. Kontribusi sektor UKM terhadap Total PDRB	PDRB sektor UKM ADHK dibagi Total PDRB ADHK dikali 100%	- Dinas Koperasi & UM - Dinas Perdagangan	- Profil Kota Malang/ Kota Malang Dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap Total PDRB	PDRB sektor Perdagangan, Akomodasi, dan Makanan ADHK dibagi Total PDRB ADHK dikali 100%	- Dinas Perdagangan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Profil Kota Malang/ Kota Malang Dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB	PDRB Industri Pengolahan ADHK dibagi Total PDRB ADHK dikali 100%	- Dinas Perindustrian	- Profil Kota Malang/ Kota Malang Dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) dibagi jumlah angkatan kerja keseluruhan (usia 15-59 tahun) dikali 100%	- Dinas Tenaga Kerja	- Hasil monev ketenagakerjaan - Profil Kota Malang

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kesempatan kerja	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100% Penjelasan : Angkatan kerja 15 tahun ke atas adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja	- Dinas Tenaga Kerja - Dinas Pemuda olahraga	- Hasil monev ketenagakerjaan - Profil Kota Malang
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	1. Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n dikurangi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1 dibagi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1 Penjelasan : Nilai penanaman modal dan investasi daerah (milyard rupiah) pada tahun berkenaan	- DPM & PTSP - Bagian Pengembangan Perekonomian - Barenlitbang	- Hasil koordinasi dengan DPM & PTSP, Bagian Pengembangan Perekonomian dan Barenlitbang
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Beras (ton) Jagung (ton) Kedelai (ton) Daging (ton) Telur (ton) Susu (ton) Ikan (ton) Gula (ton)	- Dinas Pertanian & KP	- Laporan Hasil Kegiatan monev produk pangan Daerah

MISI 3	:	Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan
--------	---	--

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Menurunnya persentase penduduk miskin	1. Angka kemiskinan	<p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dibagi Jumlah penduduk dikali 100%</p> <p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n-1 dikurangi Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n dibagi jumlah Penduduk yang masuk ketegori miskin tahun n-1 x 100%</p> <p>Penjelasan : Penduduk miskin adalah penduduk yang memenuhi minimal 9 variabel dari 14 variabel miskin menurut kriteria BPS</p>	- Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Monev Kemiskinan - Data Badan Pusat Statistik
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	1. Persentaase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	<p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan dibagi Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial dikali 100%</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud mendapatkan penanganan adalah yang telah diberikan bantuan/pelatihan</p>	- Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	1. Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah korban bencana yang tertangani dibagi Jumlah korban bencana dikali 100% Penjelasan : Kriteria tertangani adalah pada korban bencana diberikan bantuan dalam bentuk bantuan relokasi sementara, bantuan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, bantuan bimbingan konseling, rohani dan moral	- BPBD	- BPBD
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka harapan hidup perempuan ditambah angka melek huruf perempuan dan pendapatan perempuan dibagi 3 Penjelasan : Hampir sama dengan IPM namun pada perhitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki	- DP3AP2KB	- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks keterwakilan perempuan diparlemen ditambah indeks pengambilan keputusan ditambah pendapatan perkapita perempuan dibagi 3 Penjelasan : Merupakan Indeks Komposit dari Tiga Komponen Penyusun yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	- DP3AP2KB	- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama dikali 100% Penjelasan : Ditindaklanjuti adalah dilaksanakan sesuai dengan bunyi kesepakatan	- Bagian Kesra	- Hasil Mmusyawarah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	Jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 dikurangi jumlah kerusuhan tahun n dibagi jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 dikali 100%	- Bakesbangpol - Dinas Sosial	- Data Kerusuhan SARA pada Kepolisian
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas tahun n-1 dikurangi jumlah kriminalitas tahun n dibagi jumlah kriminalitas tahun n-1 dikali 100%	- Bakesbangpol	- Data tindak kriminalitas pada Kepolisian

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	2. Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak dibagi jumlah pelanggaran Perda dikali 100%	- Satpol PP	- Data Pelanggaran Daerah

MISI 4	:	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan
--------	---	---

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan Kawasan Kumuh	Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh	- DKP - DPUPR - Barenlitbang	- Hasil monev pencapaian SPM bidang Perumahan
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	Jumlah komulatif panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang dibagi jumlah komulatif panjang jalan dikali 100% Penjelasan : Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan	- Dinas Perhubungan	- Laporan hasil kegiatan pengawasan dan pemeliharaan jalan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	3. Persentase layanan air bersih	Jumlah KK yang mendapat pelayanan air bersih dibagi jumlah seluruh KK dikali 100%	- Dinas Perhubungan - DPUPR - Kel./Kec. - DPKP - Dispora	- Data KK pengguna air bersih
	4. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	Jumlah titik pantau peningkatan kualitas air dibagi Jumlah Titik Pantau dikali 100%	- DLH	- Data titik pantau kualitas air
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibagi Luasan wilayah dikali 100%	- DPUPR	- Data / Profil ruang terbuka hijau Kota Malang
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	Jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi Jumlah seluruh pelanggaran tata ruang dikali 100% Penjelasan : Pelanggaran tata ruang yang tertangani yaitu pelanggaran yang sudah ditindak mulai dari surat peringatan sampai dengan proses penyidikan	- DPUPR	- Hasil kegiatan pembinaan OKP
	3. % luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	luas wilayah yang sesuai dengan zona peruntukannya dibagi luas wilayah per zona pada akhir tahun perencanaan dikali 100% Penjelasan : Kriteria sesuai peruntukannya adalah wilayah tersebut telah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah	- DPUPR - DPKP	- DPUPR - DPKP

MISI 5	:	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
--------	---	---

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi	- Inspektorat	- Laporan hasil penetapan WBK oleh Kementerian PAN dan RB
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Malang	- Inspektorat	- Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB
	3. Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	- Inspektorat - Bagian Organisasi - BPKAD - BPPD - Sekretariat DPRD - Bagian Keuangan & Perlengkapan - Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan) - BKD	- Laporan hasil audit LDK oleh BPK

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> - DPM & PTSP - Sekretariat DPRD - Bagian Humas - Satpol PP - Bagian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur - Bagian Pemerintahan - Bagian layanan pengadaan barang/jasa - Barenlitbang - Seluruh SKPD (Program Kesekretariatan) - Bagian Keuangan & Perlengkapan - Dispora - Diskominfo - Kel. Kec. - Dispendukcapil 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

WALIKOTA MALANG

H MOCH. ANTON